

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DI SUMATERA BARAT**

TESIS

Oleh:

**AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA
00 266 008**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2002**

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI SUMATERA BARAT

Oleh : Ahmad Zuhdi Perama Putra

(Di bawah bimbingan Sjafrizal dan Elindri)

RINGKASAN

Analisis kemampuan keuangan daerah ini merupakan suatu studi tentang aspek-aspek fiskal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa umumnya penerimaan asli daerah (PAD) di Indonesia hanya mampu membiayai sebagian kecil anggaran daerah. Kondisi ini akan menyulitkan bagi daerah-daerah terutama daerah kabupaten dan kota untuk mandiri dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Permasalahan ini juga dihadapi oleh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yakni relatif rendahnya proporsi pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan, sehingga tingkat ketergantungan fiskal terhadap pusat cukup tinggi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan *pertama*, menganalisis kemampuan keuangan daerah di Sumatera Barat dengan analisis otonomi fiskal daerah dan analisis kemampuan fiskal daerah, serta analisis ketimpangan fiskal vertikal. *Kedua*, menganalisis pengaruh Variabel Ekonomi (PDRB/kapita dan struktur perekonomian daerah) terhadap otonomi fiskal daerah. Sedangkan yang *ketiga*, untuk mengetahui karakteristik kemampuan keuangan daerah (kategorisasi daerah) berdasarkan kapasitas PAD dan upaya PAD di Sumatera Barat. Hipotesis penelitian adalah: *pertama*, Struktur perekonomian daerah dan pendapatan perkapita, berpengaruh terhadap Tingkat Otonomi Fiskal Daerah. *Kedua*, Terdapat hubungan positif antara kemampuan fiskal daerah dengan kinerja fiskal daerah. *Ketiga*, Terdapat hubungan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu kendala dalam mencapai keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah adalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan terjadinya disparitas keuangan antar daerah. Berdasarkan kajian Yayasan Indonesia Forum tentang aspek finansial dari Otonomi Daerah ditemukan bahwa pada umumnya peran PAD di propinsi, kabupaten dan kota dalam pembiayaan ekonomi (APBD) sangat terbatas, kecuali Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan finansial daerah terhadap pusat dan rendahnya kemampuan keuangan daerah (YIF, 2000). Kajian ini juga menemukan bahwa terdapat korelasi yang positif antara daerah yang kaya sumber daya alam dan/atau kaya sumber daya manusia dengan peranan PAD di dalam APBD. Pada tahun 1997/1998, DKI Jakarta dan Jawa Barat yang kaya SDM dan Riau yang kaya SDA adalah tiga propinsi di dalam sampel penelitian yang memiliki kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata di atas 30 % yakni DKI 60,6 %, Riau 42,9 % dan Jawa Barat 39,5 %.

Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah-daerah yang memiliki SDA dan SDM terbatas, sumber penerimaan dalam PAD-nya hanya bisa diandalkan dan diharapkan dari sektor pajak daerah. Sebagaimana UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah (BUMD) dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah.

Dari komponen-komponen PAD seperti yang disebut di atas, yang dapat diharapkan sebagai sumber penerimaan daerah di luar SDA adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun Retribusi Daerah pada prinsipnya adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, tetapi sumbangannya terhadap PAD kabupaten dan kota cukup signifikan. Sedangkan sumbangan dari laba perusahaan daerah, besarnya relatif tergantung perusahaan daerah yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Karena itu, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan sangat menentukan kemampuan keuangan daerah, terutama dalam masa pemberlakuan otonomi daerah karena merupakan sumber utama penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga saat ini.

Adanya suatu kenyataan lain bahwa pada umumnya sumber penerimaan asli daerah-daerah di Indonesia hanya mampu membiayai sebagian kecil anggaran daerah, artinya terjadi sentralisasi yang berlebihan di sisi keuangan. Kondisi demikian jelas akan menyulitkan bagi daerah-daerah untuk mandiri dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Sumber-sumber penerimaan yang dimiliki selama ini tidak memungkinkan daerah terutama daerah kabupaten dan kota yang menjadi titik berat pelaksanaan otonomi daerah, untuk bisa memperoleh pendapatan sendiri yang signifikan. Walaupun dalam prinsip keuangan negara untuk sistem pemerintahan yang bertingkat, otonomi daerah yang nyata tidak berarti daerah harus mampu membiayai seluruh atau sebagian besar dari pengeluarannya, namun dalam situasi dewasa ini yang sarat dengan euforia demokrasi, maka nampaknya perbaikan atau peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya, kemampuan keuangan daerah harus lebih diperkuat lagi.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada Bab I sampai dengan Bab VI, terutama Bab V yang berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Selanjutnya diajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dalam rangka memperkuat kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

7.1. Kesimpulan

Pertama, dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan Tingkat Otonomi Fiskal Daerah (OFD) kabupaten/kota di Sumatera Barat pada periode penelitian masih rendah. Terutama daerah-daerah kabupaten, proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah rata-rata sangat kecil dan berada di bawah rata-rata provinsi.

Keadaan ini terjadi, disebabkan terbatasnya sumber-sumber penerimaan daerah kabupaten terutama dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini membuktikan bahwa segala jenis pungutan daerah yang ada lebih cenderung menguntungkan daerah perkotaan (*urban biased*) dibandingkan daerah kabupaten yang sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan (*rural*).

Pada tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah, ternyata tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan seluruh daerah Kabupaten dan Kota terjadi penurunan proporsi. Meskipun secara riil, PAD yang diterima kabupaten dan kota terjadi peningkatan penerimaan, tetapi disisi lain terjadi pula peningkatan dana dari bantuan dan sumbangan (DAU) serta bagi hasil. Akibatnya proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah dalam APBD kabupaten/kota tidak mengalami peningkatan yang berarti.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 2000, *Analisis Regresi : Teori, Kasus dan Solusi*, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Penerbit STIE YKPN.
- Bahl, Roy W., 1971, "A Regression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis", International Monetary Fund (IMF) staff papers, Vol.XVIII, No.3, November 1971, Washington DC, pp.570-612.
- Bahl, Roy W., 1999, *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*, Georgia State University, Atlanta.
- Basri, H. Faisal., 1994, "Hubungan Keuangan Pusat – Daerah dan Tuntutan Otonomi Daerah", Jurnal Keuangan dan Moneter, Vol II No.1, Desember 1994.
- Both, Anne, 1988, "Central Government Funding of Regional Government Expenditure in Indonesia: Post Achievement and Future Prospect" in Nick Devas, 1988, *Financig Local Government in Indonesia*, Institute of Local Government Studies, University of Birmingham.
- Elfindri, 2001, "Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten: Kendala, Prospek dan Kebijakan", Makalah Seminar Menggali PAD dalam Era Otonomi, Bandung, 18 April 2001.
- Chelliah, R.J, Hessel J.Baas, & Margareth R. Kelly, 1975, "Tax Ratios and Tax Effort in Developing Countries 1969-71", IMF Staff Papers, Vol.XXII, No.1, Maret 1975, Washington, pp.187-205.
- Davey, Kenneth, 1988., *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Terjemahan Amanullah, dkk, UI-Press Jakarta
- Delis, Arman & Budiono Sri Handoko, 1996., "The Analysis of Growth and Tax Structure Change in Indonesia: 1968-1993", BPPS-UGM, 9(2A), Mei, Yogyakarta, pp.223-38.
- Devas, Nick, et.al, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, penerjemah Masri Maris, Penerbit UI-Press, Jakarta.
- Devas, Nick, 1996, "Principles of Regional Finance", Topic 2, Paper School of Public Policy Development Administration Group, University of Birmingham, Januari 1996.